

HARMONISASI AKUNTANSI INTERNASIONAL: DARI KEBERAGAMAN MENUJU KESERAGAMAN

International Accounting Harmonization: From Diversity to Uniformity

Maryono

Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank
Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang 50233
e-mail: maryono@unisbank.ac.id

ABSTRAK

Sebagai ilmu social, standar akuntansi dan praktik akuntansi akan tergantung dari pertumbuhan ekonomi, sumber pendanaan, kelas pendidikan, pajak dan hukum, dll inflasi di mana akuntansi sana. Dalam rangka meminimalkan perbedaan standar dan praktek di bidang akuntansi, harmonisasi akuntansi internasional sebagai tonggak untuk konvergensi akuntansi.

Keywords: Harmonisasi, *Convergenci, komparabilitas*

ABSTRACT

As a social scienc, accounting standard and practice will be dependent of economic growth, funding resources, educational grade, taxable and law, inflation etc. where accounting there. In order to minimize defferenciation of standard and practice in accounting, international accounting harmonization as a milestone to accounting convergency.

Keywords: *Harmonization, Convergency, Comparability*

PENDAHULUAN

Globalisasi yang ditandai dengan beroperasinya perusahaan-perusahaan multinasional di berbagai negara telah berperan menjembatani bertemunya praktek akuntansi yang berbeda dari berbagai negara baik di antara negara maju yang satu dengan dengan negara maju lainnya, maupun perbedaan antara negara berkembang yang satu dengan negara berkembang lainnya, bahkan antara negara maju dengan negara berkembang. Perbedaan yang demikian ini dapat dimengerti mengingat ilmu akuntansi sebagai bagian dari ilmu sosial akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana praktek akuntansi tersebut berada. Akuntansi hanya akan bermanfaat apabila sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menjadi bagian dari lingkungan akuntansi tersebut.

Adanya perbedaan praktek akuntansi yang diakibatkan oleh adanya perbedaan standar akuntansi dapat mengakibatkan daya banding akuntansi menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Suatu laporan keuangan yang merupakan hasil dari proses akuntansi pada suatu perusahaan di suatu negara yang menunjukkan adanya laba atau menggambarkan kinerja yang baik, dapat saja akan menunjukkan perbedaan yang sebaliknya apabila laporan keuangan tersebut dibuat berdasarkan standar akuntansi di negara yang memiliki standar berbeda dengan laporan keuangan tersebut.

Kondisi yang demikian ini tentu saja menimbulkan permasalahan yang serius mengingat tujuan penyampaian laporan keuangan oleh manajemen adalah untuk dapat difahami dan dipercayai oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Namun dengan adanya kenyataan bahwa di dunia ini terdapat berbagai standar akuntansi yang berlaku di masing-masing negara yang semuanya dapat menghasilkan laporan keuangan yang beragam dapat mengurangi tingkat kepercayaan pihak eksternal terhadap laporan keuangan tersebut.

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong perlunya harmonisasi terhadap akuntansi, contoh perbandingan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Amerika Serikat dan Standar Akuntansi Internasional yang dikeluarkan oleh

International Accounting Standard Board. Dalam tulisan ini juga disajikan tentang perkembangan harmonisasi akuntansi internasional serta hasil-hasil yang telah dicapai sampai dengan saat ini.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PERLUNYA HARMONISASI TERHADAP AKUNTANSI

Standar dan praktek akuntansi di setiap negara merupakan hasil interaksi yang kompleks di antara faktor ekonomi, sejarah, kelembagaan, dan budaya. Secara terperinci Choi dan Meek (2005) menyebutkan delapan faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi. Mengingat bahwa di masing-masing negara ke delapan faktor tersebut tentu saja tidak seragam, maka kedelapan faktor tersebut juga dapat menjadi pendorong perlunya harmonisasi akuntansi.

1. Sumber Pendanaan

Pergeseran atau perubahan sumber pendanaan perusahaan akan berpengaruh terhadap perubahan atau bertambahnya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Perusahaan dengan skala permodalan yang kecil dan hanya menggunakan sumber pendanaan dari pemilik saja berarti mereka tidak atau belum terikat terhadap kreditur atau investor. Sedangkan perusahaan dengan skala besar yang memerlukan pendanaan dari eksternal baik dari kreditur maupun investor berarti mereka telah terikat oleh kepentingan kreditur maupun investor. Di negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat seperti di Amerika Serikat dan Inggris, akuntansi memiliki fokus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan tingkat resiko terkait. Pengungkapan dilakukan sangat lengkap untuk memenuhi ketentuan pemilikan publik yang luas. Sebaliknya pada sistem berbasis kredit di mana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki fokus atas perlindungan kreditur melalui pengukuran akuntansi yang konservatif. Karena lembaga keuangan memiliki akses langsung terhadap informasi apa saja yang diinginkan, pengungkapan publik yang luas dianggap tidak perlu. Contohnya adalah Swiss dan Jepang.

2. Sistem Hukum

Dunia barat memiliki dua orientasi dasar yaitu hukum kode (sipil) dan hukum umum (kasus). Dalam negara-negara hukum kode, hukum merupakan satu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur. Kodifikasi dan prosedur akuntansi merupakan hal yang wajar dan sesuai di sana. Dengan demikian di negara-negara hukum kode, aturan akuntansi digabungkan dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap dan mencakup banyak prosedur. Sebaliknya hukum umum berkembang atas dasar kasus per kasus tanpa adanya usaha untuk mencakup seluruh kasus dalam kode yang lengkap. Pada kebanyakan negara hukum umum aturan akuntansi ditetapkan oleh organisasi profesional sektor swasta. Hal ini memungkinkan aturan akuntansi lebih adaptif dan inovatif.

3. Perpajakan

Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya untuk keperluan pajak. Contoh untuk kasus ini adalah di Jerman dan Swedia. Di negara lain seperti di Belanda, akuntansi keuangan dan pajak berbeda : laba kena pajak pada dasarnya adalah laba akuntansi keuangan yang disesuaikan terhadap perbedaan-perbedaan dengan hukum pajak. Bila terdapat perbedaan dalam akuntansi keuangan dengan hukum pajak, maka perusahaan biasanya harus menyesuaikan dengan hukum pajak. Contoh di Indonesia tentang pencatatan persediaan yang dalam ketentuan perpajakan hanya memperbolehkan metode masuk pertama keluar pertama (*fifo*) dan rata-rata.

4. Ikatan Politik dan Ekonomi

Penyebaran ide dan teknologi akuntansi sering dilakukan melalui penaklukan, perdagangan, dan kekuatan lain. Sistem pencatatan berpasangan (*double entry*) yang berasal dari Itali pada tahun 1940an secara perlahan-lahan menyebar luas di Eropa bersamaan dengan gagasan-gagasan pembaharuan lainnya. Inggris dan Jerman mengeksport akuntansi ke negara-negara yang menjadi kekuasaannya. Amerika Serikat memaksakan praktek akuntansi bergaya Amerika kepada Jepang. Negara-negara berkembang menggunakan sistem akuntansi yang

dikembangkan di tempat lain (contoh India), sedangkan yang lainnya menggunakan sistem akuntansi yang mereka pilih sendiri. Jadi dalam pengembangan sistem akuntansi di suatu negara sangat tergantung oleh ikatan politik atau ekonomi pada negara lainya.

5. Inflasi

Inflasi menyebabkan distorsi terhadap akuntansi biaya historis dan mempengaruhi kecenderungan suatu negara untuk menerapkan perubahan harga terhadap akun-akun perusahaan. Laporan keuangan yang disampaikan manajemen pada saat terjadi inflasi dapat menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat disebabkan karena pencatatan biaya yang terlalu rendah akibat penghitungan biaya penyusutan dari aktiva tetap yang dicatat terlalu rendah nilainya. Laba rugi yang dicatat perusahaan bisa jadi tidak menggambarkan perubahan kepemilikan aktiva yang semestinya karena laba rugi dalam nominal tidak diikuti dengan penambahan atau pengurangan kekayaan yang sepadan.

6. Tingkat Perkembangan Ekonomi

Perkembangan tingkat ekonomi suatu negara akan mendorong inovasi-inovasi baik dalam bertransaksi maupun timbulnya instrumen-instrumen baru dalam berinvestasi, sistem pembayaran maupun hal lain yang dibutuhkan dengan perkembangan ekonomi yang terjadi. Saat ini banyak perekonomian yang berubah dari industri ke perekonomian jasa. Masalah akuntansi mengenai penilaian aktiva tetap dan depresiasi yang sangat relevan dalam sektor manufaktur menjadi semakin kurang penting. Tantangan-tantangan akuntansi yang baru seperti penilaian aktiva tidak berwujud dan sumber daya manusia menjadi semakin berkembang.

7. Tingkat Pendidikan

Praktek akuntansi yang rumit dan sangat kompleks hanya akan dapat dihasilkan oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Sementara di pihak lain informasi akuntansi yang begitu kompleks juga hanya akan bermanfaat bila dibaca oleh mereka yang memiliki pendidikan memadai sehingga mampu memahami yang disajikan dalam laporan akuntansi. Jadi pada masyarakat di mana sebagian besar penduduknya

masih berpendirian rendah kiranya akuntansi yang sederhana akan lebih bermanfaat bila dibandingkan dengan akuntansi yang sangat rumit dan kompleks.

8. Budaya

Hofstede dalam Choi dan Meek (2005) menjelaskan bahwa budaya dijelaskan dalam empat dimensi yaitu : individualisme lawan kolektivisme, jarak kekuasaan yang besar lawan jarak kekuasaan yang kecil, penghindaran ketidakpastian yang kuat lawan penghindaran ketidakpastian yang lemah, dan maskulinitas yang membedakan pria dan wanita. Keempat dimensi tersebut akan berpengaruh terhadap sistem dan praktek akuntansi di suatu negara.

PERKEMBANGAN HARMONISASI AKUNTANSI INTERNASIONAL

Usaha untuk mengharmonisasikan akuntansi secara internasional sudah dimulai sejak lama bahkan sebelum terbentuknya International Accounting Standard Committee (IASC) didirikan pada tahun 1973. Pada tahun 1959, Jacob Krayenhof, mitra pendiri sebuah firma akuntan independen Eropa yang utama mendorong agar usaha pembuatan standar akuntansi internasional dimulai. Pada tahun 1976, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) mengeluarkan Deklarasi Investasi dalam Perusahaan Multinasional yang berisi panduan untuk "Pengungkapan Informasi". Tahun 1978 Komisi Masyarakat Eropa mengeluarkan Dekrit Keempat sebagai langkah pertama menuju harmonisasi akuntansi Eropa.

Pada tahun 1981 IASC mendirikan kelompok konsultatif yang terdiri dari organisasi non anggota untuk memperluas masukan-masukan dalam pembuatan standar internasional. Di tahun 1984, Bursa Efek London menyatakan bahwa pihaknya berharap agar perusahaan-perusahaan yang mencatatkan sahamnya tetapi tidak didirikan di Inggris dan Irlandia menyesuaikan dengan akuntansi internasional. Tahun 2001 Badan Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standard Board-IASB) menggantikan IASC dan mengambil alih tanggungjawab per tanggal 1 April 2001. Standar IASB disebut Standar Pelaporan Keuangan Internasional

(International Financial Reporting Standard-IFRS) dan termasuk di dalamnya IAS yang dikeluarkan IASC. Di tahun 2002 Parlemen Eropa menyetujui proposal Komisi Eropa bahwa secara nyata seluruh perusahaan Uni Eropa yang tercatat sahamnya harus mengikuti standar IASB dimulai selambat-lambatnya tahun 2005 dalam laporan keuangan konsolidasi. Pada tahun yang sama IASB dan FASB menandatangani "Perjanjian Norwalk" yang berisi komitmen bersama terhadap konvergensi standar akuntansi internasional dan Amerika Serikat.

Pada tahun 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada hari Selasa, 23 Desember 2008 dalam rangka Ulang tahunnya ke-51 mendeklarasikan rencana Indonesia untuk *convergence* terhadap *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dalam pengaturan standar akuntansi keuangan. Pengaturan perlakuan akuntansi yang konvergen dengan IFRS akan diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal **1 Januari 2012**. Hal ini diputuskan setelah melalui pengkajian dan penelaahan yang mendalam dengan mempertimbangkan seluruh risiko dan manfaat konvergensi terhadap IFRS. *Compliance* terhadap IFRS telah dilakukan oleh ratusan Negara di dunia diantaranya adalah Korea, India dan Canada yang akan melakukan konvergensi terhadap IFRS pada tahun 2011. Data dari *International Accounting Standard Board* (IASB) menunjukkan saat ini terdapat 102 negara yang telah menerapkan IFRS dengan berbagai tingkat keharusan yang berbeda-beda. Sebanyak 23 negara mengizinkan penggunaan IFRS secara sukarela, 75 negara mewajibkan penggunaan IFRS untuk seluruh perusahaan domestik, dan empat Negara mewajibkan penggunaan IFRS untuk perusahaan domestik tertentu.

Compliance terhadap IFRS memberikan manfaat terhadap keterbandingan laporan keuangan dan peningkatan transparansi. Melalui *compliance* maka laporan keuangan perusahaan Indonesia akan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dari negara lain, sehingga akan sangat jelas kinerja perusahaan mana yang lebih baik. Selain itu, program konvergensi juga bermanfaat untuk mengurangi biaya modal (*cost of capital*), meningkatkan

investasi global, dan mengurangi beban penyusunan laporan keuangan. *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dijadikan sebagai referensi utama pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia karena IFRS merupakan standar yang sangat kokoh. Penyusunannya didukung oleh para ahli dan dewan konsultatif internasional dari seluruh penjuru dunia. Mereka menyediakan waktu cukup dan didukung dengan masukan literatur dari ratusan orang dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai macam yurisdiksi di seluruh dunia. Dengan telah dideklarasikannya program konvergensi terhadap IFRS ini, maka pada tahun 2012 seluruh standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI akan mengacu kepada IFRS dan diterapkan oleh entitas.

PERBANDINGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN:INDONESIA, AMERIKA SERIKAT, DAN INTERNASIONAL.

Untuk melihat terjadinya perbedaan praktek akuntansi di berbagai negara di dunia ini, berikut ini disampaikan contoh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, Amerika Serikat (Financial Accounting Standard Board/FASB) dan Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standard/IAS) atau International Financial Report Standard (IFRS).

Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang tentu saja sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat maupun negara maju lainnya baik dalam praktek bisnis maupun standar dan praktek akutansinya. Praktek bisnis yang telah berkembang di negara maju dan telah dibuat standar akutansinya namun praktek bisnis tersebut belum berkembang di Indonesia tentu saja belum memerlukan standar akuntansi. Sementara praktek bisnis yang berkembang di Indonesia namun tidak berkembang di negara lainnya termasuk di negara-negara maju, maka dibuat standar akutansinya seperti standar akuntansi untuk perbankan syariah.

Standar Akuntansi Keuangan Amerika Serikat

Amerika merupakan salah satu Negara maju di dunia yang mempunyai pengaruh politik,

ekonomi, social budaya termasuk akuntansi terhadap sesama Negara maju maupun Negara berkembang sangat kuat. Dapat diibaratkan apa yang terjadi di Amerika sekarang secara perlahan atau cepat akan ditiru di Negara lain. Khusus mengenai praktek bisnis di Amerika berkembang begitu pesat yang pada akhirnya memerlukan standard an praktek akuntansi yang berkembang pula sesuai dengan perkembangan bisnis yang terjadi. Bila dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia maupun Standar Akuntansi Internasional maka standar akuntansi keuangan di Amerika jauh lebih banyak akibat praktek bisnis yang memang lebih beragam

Standar Akuntansi Internasional (IAS / IFRS)

International Accounting Standard/International Financial Reporting Standard dikeluarkan oleh *International Accounting Standard Board* atau Badan Standar Akuntansi Internasional. Mengingat tujuan penyusunan standar akuntansi tersebut untuk dapat dipergunakan sebanyak mungkin negara di dunia maka dalam penyusunan standar akuntansi tertentu saja Badan Standar Akuntansi Internasional mempertimbangkan kondisi sebagian besar negara sehingga sesuai dengan kebutuhan mereka. Bila kita bandingkan dengan standar akuntansi Amerika maka dari segi jumlah standar yang dikeluarkan Badan Standar Akuntansi Internasional jauh lebih sedikit karena memang mereka tidak mengacu pada perkembangan bisnis dan kebutuhan akuntansi di Amerika saja melainkan pada sebagian besar negara sehingga standar akuntansi yang mereka keluarkan dapat diadopsi baik sebagian maupun sepenuhnya.

Ketiga standar akuntansi tersebut baik yang berlaku di Indonesia, Amerika Serikat, dan standar Internasional, maka secara kuantitas jelas tampak perbedaan yang nyata. Bila melihat dari segi jumlah standar maka standar akuntansi di Indonesia bila dibandingkan dengan Amerika Serikat hanya kurang lebih sepertiganya saja sementara bila dibandingkan dengan standar akuntansi internasional standar akuntansi di Indonesia lebih banyak. Perbedaan jumlah standar akuntansi di Amerika yang jauh lebih banyak dari Indonesia dapat dijelaskan bahwa tingkat perkembangan ekonomi Amerika jauh lebih maju bila dibandingkan dengan Indonesia sehingga di

Amerika telah berkembang berbagai jenis instrumen yang dapat dikategorikan ke dalam rekening harta, kewajiban, maupun ekuitas. Sementara bila di Indonesia ada standar akuntansi yang sudah berlaku di Amerika tetapi belum ada di Indonesia menunjukkan bahwa untuk Indonesia hal tersebut masih dipandang belum mendesak atau penting mengingat frekuensi terjadinya masih rendah atau bahkan belum timbul sama sekali.

Sementara standar akuntansi internasional yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan Amerika bahkan Indonesia dapat dijelaskan bahwa standar akuntansi internasional berusaha sebanyak mungkin dapat mengadopsi berbagai keragaman standar akuntansi di berbagai negara di dunia. Standar akuntansi internasional tersebut diharapkan banyak negara yang dapat mengadopsi atau menggunakan standar yang ada untuk diberlakukan di negara masing-masing. Semakin banyaknya negara yang menggunakan standar akuntansi internasional berarti telah terjadi penyeragaman standar akuntansi meskipun belum sepenuhnya, mengingat seperti di Amerika berarti masih ada standar akuntansi lainnya yang belum tercakup dalam standar akuntansi internasional.

IMPLIKASI BAGI STANDAR DAN PRAKTEK AKUNTANSI DI INDONESIA

Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis internasional atau global tentu saja juga akan menghadapi permasalahan dalam standar maupun praktek akuntansinya yang mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan perkembangan akuntansi yang berlaku secara internasional. Beberapa negara maju antara lain Perancis telah memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk menggunakan standar akuntansi Perancis maupun standar akuntansi internasional yaitu *Ineternational Financial Report Standard* yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board. Pemberian kebebasan kepada perusahaan untuk menggunakan *IFRS* tentu saja dapat menjadi kecenderungan bagi negara lainnya yang pada akhirnya akan mendorong penggunaan *IFRS* secara meluas di berbagai negara termasuk Indonesia.

Namun demikian merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi praktek akuntansi, maka Indonesia tidak dengan serta merta mengadopsi *IFRS* secara penuh atau mutlak mengingat

perbedaan faktor pendukung sehingga harus dilakukan kajian terlebih dahulu standar mana yang sudah dapat diadopsi dan diterapkan di Indonesia dan standar mana yang belum dapat diadopsi untuk diterapkan di Indonesia, dengan demikian penerapan *IFRS* dibatasi terlebih dahulu hanya pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai kemampuan penyesuaian tinggi terhadap perubahan penggunaan standar yang berlaku di Indonesia ke *IFRS*. Perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan yang telah go publik mungkin merupakan perusahaan-perusahaan yang telah siap beralih dari penggunaan standar akuntansi Indonesia ke dalam standar akuntansi internasional mengingat selama ini mereka telah berinteraksi dengan investor, kreditor dan badan-badan internasional. Hal ini mengingat di Indonesia terdapat heteroginitas perusahaan dari perusahaan skala mikro, kecil, menengah hingga yang besar.

Perbedaan karakteristik perusahaan ini tentu saja menuntut pemberlakuan standar akuntansi yang berbeda sehingga masing-masing kelompok perusahaan dapat memilih standar akuntansi sesuai dengan karakteristik perusahaan. Khusus mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya saat ini sedang pada tahap penyerapan aspirasi dari berbagai pihak yang berkepentingan guna penerapan standar akuntansi bagi usaha mikro, kecil dan menengah, maka pada satu sisi Indonesia dapat menerima dan mengadopsi standar akuntansi yang berlaku secara internasional sehingga akan meningkatkan daya banding laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Sementara di sisi yang lain Indonesia masih dapat memberikan ruang gerak bagi penerapan standar yang bersifat nasional bagi perusahaan-perusahaan yang secara teknis belum dapat menyesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku secara internasional.

PENUTUP

Meskipun upaya-upayatelah dilakukan terhadap usaha mengharmonikan akuntansi internasional, keberagaman praktek akuntansi di masa mendatang masih akan tetap terjadi. Hal ini mengingat bahwa keberadaan akuntansi sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana akuntansi berada, dan tiap tiap negara akan tetap mengalami

perbedaan meskipun terdapat kecenderungan menuju keseragaman.

Bahwa ke depan praktek akuntansi semakin seragam di berbagai negara belahan dunia ini tentu saja akan dapat meningkatkan kualitas akuntansi internasional khususnya menyangkut daya banding. Semakin seragam praktek akuntansi berarti kinerja antar perusahaan di berbagai negara akan dengan mudah diperbandingkan melalui laporan keuangan yang mereka buat.

Untuk lebih dapat mengharmoniskan akuntansi internasional maka perlu dibangun komunikasi dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap akuntansi dari berbagai negara, sehingga dapat mengurangi perbedaan-perbedaan dalam membangun standar maupun praktek akuntansi di masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

Frederick D.S. Choi dan Gary K. Meek, Penterjemah Edaward Tanujaya, 2005, Akuntansi Internasional, Salemba Empat, Jakarta.

Sidney J. Gray, Stephen B. Salter, Lee H. Radebaugh., 2001, Global Accounting and Control : A Managerial Emphasis, John Wiley & Sons, Inc

www.iaiglobal.org

www.fasb.org

www.iasplus.com

Tabel 1. Daftar Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

NO.	JUDUL STANDAR
1.	Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 1998)
2.	Laporan Arus Kas (Reformat 2007)
3.	Laporan Keuangan Interim (Reformat 2007)
4.	Laporan Keuangan Konsolidasi (Reformat 2007)
5.	Pelaporan Segmen (Revisi 2000)
6.	
7.	Hubungan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Reformat 2007)
8.	Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (Revisi 2003)
9.	Panyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek
10.	Transaksi Dalam Mata Uang Asing (Reformat 2007)
11.	Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing (Reformat 2007)
12.	Pelaporan Keuangan Mengenai Bagian Partisipasi Dalam Pengendalian Bersama Operasi dan Aset
13.	Properti Investasi (Revisi 2007)
14.	Persediaan (Reformat 2007)
15.	Akuntansi Untuk Investasi Dalam Perusahaan Asosiasi (Reformat 2007)
16.	Aset Tetap (Revisi 2007)
17.	Akuntansi Penyusutan
18.	Akuntansi Dana Pensiun
19.	Aset Tidak Berwujud (Revisi 2000)
20.	Biaya Riset dan Pengembangan
21.	Akuntansi Ekuitas
22.	Akuntansi Penggabungan Usaha (Reformat 2007)
23.	Pendapatan (Reformat 2007)
24.	Imbalan Kerja (Revisi 2004)
25.	Laba atau Rugi Bersih Untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi (Reformat 2007)
26.	Biaya Pinjaman (Revisi 1997) (Reformat 2007)
27.	Akuntansi Perkoperasian (Revisi 1998) (Reformat 2007)
28.	Akuntansi Asuransi Kerugian (Revisi 1996)
29.	Akuntansi Minyak dan Gas Bumi
30.	Sewa (Revisi 2007)
31.	Akuntansi Perbankan (Revisi 2000)
32.	Akuntansi Kehutanan
33.	Akuntansi Pertambangan Umum
34.	Akuntansi Kontrak Kontruksi
35.	Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi
36.	Akuntansi Asuransi Jiwa
37.	Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol (Reformat 2007)
38.	Akuntansi Restrukturisasi Ekuitas Sepengendali (Reformat 2004)
39.	Akuntansi Kerjasama Operasi (Reformat 2007)
40.	Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan / Perusahaan Asosiasi
41.	Akuntansi Waran (Reformat 2007)
42.	Akuntansi Perusahaan Efek (Reformat 2007)
43.	Akuntansi Anjak Piutang (Reformat 2007)
44.	Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat (Reformat 2007)

45.	Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Reformat 2007)
46.	Akuntansi Pajak Penghasilan (Reformat 2007)
47.	Akuntansi Tanah
48.	Penurunan Nilai Aset
49.	Akuntansi Reksa Dana
50.	Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan (Revisi 2006)
51.	Akuntansi Kuasi-Reorganisasi (Revisi 2003)
52.	Mata Uang Pelaporan
53.	Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham
54.	Akuntansi Restrukturisasi Utang-Piutang Bermasalah
55.	Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran (Revisi 2006)
56.	Laba Per Saham (LPS)
57.	Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, Aset Kontijensi
58.	Operasi Dalam Penghentian
59.	Akuntansi Perbankan Syariah

Sumber : www.iaiglobal.org

Tabel 2. Standar Akuntansi Keuangan Amerika Serikat (FASB)

NO.	JUDUL STANDAR
1.	<i>Disclosure of Foreign Currency Translation Information</i>
2.	<i>Accounting for Research and Development Costs</i>
3.	<i>Reporting Accounting Changes in Interim Financial Statements—an amendment of APB Opinion No. 28</i>
4.	<i>Reporting Gains and Losses from Extinguishment of Debt—an amendment of APB Opinion No. 30</i>
5.	<i>Accounting for Contingencies</i>
6.	<i>Classification of Short-Term Obligations Expected to Be Refinanced—an amendment of ARB No. 43, Chapter 3A</i>
7.	<i>Accounting and Reporting by Development Stage Enterprises</i>
8.	<i>Accounting for the Translation of Foreign Currency Transactions and Foreign Currency Financial Statements</i>
9.	<i>Accounting for Income Taxes: Oil and Gas Producing Companies—an amendment of APB Opinions No. 11 and 23</i>
10.	<i>Extension of "Grandfather" Provisions for Business Combinations—an amendment of APB Opinion No. 16</i>
11.	<i>Accounting for Contingencies: Transition Method—an amendment of FASB Statement No. 5</i>
12.	<i>Accounting for Certain Marketable Securities</i>
13.	<i>Accounting for Leases</i>
14.	<i>Financial Reporting for Segments of a Business Enterprise</i>
15.	<i>Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debt Restructurings</i>
16.	<i>Prior Period Adjustments</i>
17.	<i>Accounting for Leases: Initial Direct Costs—an amendment of FASB Statement No. 13</i>
18.	<i>Financial Reporting for Segments of a Business Enterprise: Interim Financial Statements—an amendment of FASB Statement No. 14</i>
19.	<i>Financial Accounting and Reporting by Oil and Gas Producing Companies</i>
20.	<i>Accounting for Forward Exchange Contracts—an amendment of FASB Statement No. 8</i>
21.	<i>Suspension of the Reporting of Earnings per Share and Segment Information by Nonpublic Enterprises—an amendment of APB Opinion No. 15 and FASB Statement No. 14</i>
22.	<i>Changes in the Provisions of Lease Agreements Resulting from Refundings of Tax-Exempt Debt—an amendment of FASB Statement No. 13</i>
23.	<i>Inception of the Lease—an amendment of FASB Statement No. 13</i>
24.	<i>Reporting Segment Information in Financial Statements That Are Presented in Another Enterprise's Financial Report—an amendment of FASB Statement No. 14</i>
25.	<i>Suspension of Certain Accounting Requirements for Oil and Gas Producing Companies—an amendment of FASB Statement No. 19</i>
26.	<i>Profit Recognition on Sales-Type Leases of Real Estate—an amendment of FASB Statement No. 13</i>
27.	<i>Classification of Renewals or Extensions of Existing Sales-Type or Direct Financing Leases—an amendment of FASB Statement No. 13</i>
28.	<i>Accounting for Sales with Leasebacks—an amendment of FASB Statement No. 13</i>
29.	<i>Determining Contingent Rentals—an amendment of FASB Statement No. 13</i>
30.	<i>Disclosure of Information about Major Customers—an amendment of FASB Statement No. 14</i>
31.	<i>Accounting for Tax Benefits Related to U.K. Tax Legislation Concerning Stock Relief</i>
32.	<i>Specialized Accounting and Reporting Principles and Practices in AICPA Statements of Position and Guides on Accounting and Auditing Matters—an amendment of APB Opinion No. 20</i>
33.	<i>Financial Reporting and Changing Prices</i>
34.	<i>Capitalization of Interest Cost</i>
35.	<i>Accounting and Reporting by Defined Benefit Pension Plans</i>

36.	<i>Disclosure of Pension Information—an amendment of APB Opinion No. 8</i>
37.	<i>Balance Sheet Classification of Deferred Income Taxes—an amendment of APB Opinion No. 11</i>
38.	<i>Accounting for Preacquisition Contingencies of Purchased Enterprises—an amendment of APB Opinion No. 16</i>
39.	<i>Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Mining and Oil and Gas—a supplement to FASB Statement No. 33</i>
40.	<i>Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Timberlands and Growing Timber—a supplement to FASB Statement No. 33</i>
41.	<i>Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Income-Producing Real Estate—a supplement to FASB Statement No. 33</i>
42.	<i>Determining Materiality for Capitalization of Interest Cost—an amendment of FASB Statement No. 34</i>
43.	<i>Accounting for Compensated Absences</i>
44.	<i>Accounting for Intangible Assets of Motor Carriers—an amendment of Chapter 5 of ARB No. 43 and an interpretation of APB Opinions 17 and 30</i>
45.	<i>Accounting for Franchise Fee Revenue</i>
46.	<i>Financial Reporting and Changing Prices: Motion Picture Films</i>
47.	<i>Disclosure of Long-Term Obligations</i>
48.	<i>Revenue Recognition When Right of Return Exists</i>
49.	<i>Accounting for Product Financing Arrangements</i>
50.	<i>Financial Reporting in the Record and Music Industry</i>
51.	<i>Financial Reporting by Cable Television Companies</i>
52.	<i>Foreign Currency Translation</i>
53.	<i>Financial Reporting by Producers and Distributors of Motion Picture Films</i>
54.	<i>Financial Reporting and Changing Prices: Investment Companies—an amendment of FASB Statement No. 33</i>
55.	<i>Determining whether a Convertible Security is a Common Stock Equivalent—an amendment of APB Opinion No. 15</i>
56.	<i>Designation of AICPA Guide and Statement of Position (SOP) 81-1 on Contractor Accounting and SOP 81-2 concerning Hospital-Related Organizations as Preferable for Purposes of Applying APB Opinion 20—an amendment of FASB Statement No. 32</i>
57.	<i>Related Party Disclosures</i>
58.	<i>Capitalization of Interest Cost in Financial Statements That Include Investments Accounted for by the Equity Method—an amendment of FASB Statement No. 34</i>
59.	<i>Deferral of the Effective Date of Certain Accounting Requirements for Pension Plans of State and Local Governmental Units—an amendment of FASB Statement No. 35</i>
60.	<i>Accounting and Reporting by Insurance Enterprises</i>
61.	<i>Accounting for Title Plant</i>
62.	<i>Capitalization of Interest Cost in Situations Involving Certain Tax-Exempt Borrowings and Certain Gifts and Grants—an amendment of FASB Statement No. 34</i>
63.	<i>Financial Reporting by Broadcasters</i>
64.	<i>Extinguishments of Debt Made to Satisfy Sinking-Fund Requirements—an amendment of FASB Statement No. 4</i>
65.	<i>Accounting for Certain Mortgage Banking Activities</i>
66.	<i>Accounting for Sales of Real Estate</i>
67.	<i>Accounting for Costs and Initial Rental Operations of Real Estate Projects</i>
68.	<i>Research and Development Arrangements</i>
69.	<i>Disclosures about Oil and Gas Producing Activities—an amendment of FASB Statements 19, 25, 33, and 39</i>
70.	<i>Financial Reporting and Changing Prices: Foreign Currency Translation—an amendment of FASB Statement No. 33</i>
71.	<i>Accounting for the Effects of Certain Types of Regulation</i>
72.	<i>Accounting for Certain Acquisitions of Banking or Thrift Institutions—an amendment of APB Opinion No. 17, an interpretation of APB Opinions 16 and 17, and an amendment of FASB</i>

	<i>Interpretation No. 9</i>
73.	<i>Reporting a Change in Accounting for Railroad Track Structures—an amendment of APB Opinion No. 20</i>
74.	<i>Accounting for Special Termination Benefits Paid to Employees</i>
75.	<i>Deferral of the Effective Date of Certain Accounting Requirements for Pension Plans of State and Local Governmental Units—an amendment of FASB Statement No. 35</i>
76.	<i>Extinguishment of Debt—an amendment of APB Opinion No. 26</i>
77.	<i>Reporting by Transferors for Transfers of Receivables with Recourse</i>
78.	<i>Classification of Obligations That Are Callable by the Creditor—an amendment of ARB No. 43, Chapter 3A</i>
79.	<i>Elimination of Certain Disclosures for Business Combinations by Nonpublic Enterprises—an amendment of APB Opinion No. 16</i>
80.	<i>Accounting for Futures Contracts</i>
81.	<i>Disclosure of Postretirement Health Care and Life Insurance Benefits</i>
82.	<i>Financial Reporting and Changing Prices: Elimination of Certain Disclosures—an amendment of FASB Statement No. 33</i>
83.	<i>Designation of AICPA Guides and Statement of Position on Accounting by Brokers and Dealers in Securities, by Employee Benefit Plans, and by Banks as Preferable for Purposes of Applying APB Opinion 20—an amendment FASB Statement No. 32 and APB Opinion No. 30 and a rescission of FASB Interpretation No. 10</i>
84.	<i>Induced Conversions of Convertible Debt—an amendment of APB Opinion No. 26</i>
85.	<i>Yield Test for Determining whether a Convertible Security is a Common Stock Equivalent—an amendment of APB Opinion No. 15</i>
86.	<i>Accounting for the Costs of Computer Software to Be Sold, Leased, or Otherwise Marketed</i>
87.	<i>Employers' Accounting for Pensions</i>
88.	<i>Employers' Accounting for Settlements and Curtailments of Defined Benefit Pension Plans and for Termination Benefits</i>
89.	<i>Financial Reporting and Changing Prices</i>
90.	<i>Regulated Enterprises-Accounting for Abandonments and Disallowances of Plant Costs—an amendment of FASB Statement No. 71</i>
91.	<i>Accounting for Nonrefundable Fees and Costs Associated with Originating or Acquiring Loans and Initial Direct Costs of Leases—an amendment of FASB Statements No. 13, 60, and 65 and a rescission of FASB Statement No. 17</i>
92.	<i>Regulated Enterprises-Accounting for Phase-in Plans—an amendment of FASB Statement No. 71</i>
93.	<i>Recognition of Depreciation by Not-for-Profit Organizations</i>
94.	<i>Consolidation of All Majority-owned Subsidiaries—an amendment of ARB No. 51, with related amendments of APB Opinion No. 18 and ARB No. 43, Chapter 12</i>
95.	<i>Statement of Cash Flows</i>
96.	<i>Accounting for Income Taxes</i>
97.	<i>Accounting and Reporting by Insurance Enterprises for Certain Long-Duration Contracts and for Realized Gains and Losses from the Sale of Investments</i>
98.	<i>Accounting for Leases: Sale-Leaseback Transactions Involving Real Estate, Sales-Type Leases of Real Estate, Definition of the Lease Term, and Initial Direct Costs of Direct Financing Leases—an amendment of FASB Statements No. 13, 66, and 91 and a rescission of FASB Statement No. 26 and Technical Bulletin No. 79-11</i>
99.	<i>Deferral of the Effective Date of Recognition of Depreciation by Not-for-Profit Organizations—an amendment of FASB Statement No. 93</i>
100.	<i>Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective Date of FASB Statement No. 96—an amendment of FASB Statement No. 96</i>
101.	<i>Regulated Enterprises-Accounting for the Discontinuation of Application of FASB Statement No. 71</i>
102.	<i>Statement of Cash Flows-Exemption of Certain Enterprises and Classification of Cash Flows from Certain Securities Acquired for Resale—an amendment of FASB Statement No. 95</i>

103.	<i>Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective Date of FASB Statement No. 96—an amendment of FASB Statement No. 96</i>
104.	<i>Statement of Cash Flows-Net Reporting of Certain Cash Receipts and Cash Payments and Classification of Cash Flows from Hedging Transactions—an amendment of FASB Statement No. 95</i>
105.	<i>Disclosure of Information about Financial Instruments with Off-Balance-Sheet Risk and Financial Instruments with Concentrations of Credit Risk</i>
106.	<i>Employers' Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions</i>
107.	<i>Disclosures about Fair Value of Financial Instruments</i>
108.	<i>Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective Date of FASB Statement No. 96—an amendment of FASB Statement</i>
109.	<i>Accounting for Income Taxes</i>
110.	<i>Reporting by Defined Benefit Pension Plans of Investment Contracts—an amendment of FASB Statement No. 35</i>
111.	<i>Rescission of FASB Statement No. 32 and Technical Corrections</i>
112.	<i>Employers' Accounting for Postemployment Benefits—an amendment of FASB Statements No. 5 and 43</i>
113.	<i>Accounting and Reporting for Reinsurance of Short-Duration and Long-Duration Contracts</i>
114.	<i>Accounting by Creditors for Impairment of a Loan—an amendment of FASB Statements No. 5 and 15</i>
115.	<i>Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities</i>
116.	<i>Accounting for Contributions Received and Contributions Made</i>
117.	<i>Financial Statements of Not-for-Profit Organizations</i>
118.	<i>Accounting by Creditors for Impairment of a Loan-Income Recognition and Disclosures—an amendment of FASB Statement No. 114</i>
119.	<i>Disclosure about Derivative Financial Instruments and Fair Value of Financial Instruments</i>
120.	<i>Accounting and Reporting by Mutual Life Insurance Enterprises and by Insurance Enterprises for Certain Long-Duration Participating Contracts—an amendment of FASB Statements 60, 97, and 113 and Interpretation No. 40</i>
121.	<i>Accounting for the Impairment of Long-Lived Assets and for Long-Lived Assets to Be Disposed Of</i>
122.	<i>Accounting for Mortgage Servicing Rights—an amendment of FASB Statement No. 65</i>
123.	<i>Share-Based Payment</i>
124.	<i>Accounting for Certain Investments Held by Not-for-Profit Organizations</i>
125.	<i>Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities</i>
126.	<i>Exemption from Certain Required Disclosures about Financial Instruments for Certain Nonpublic Entities—an amendment to FASB Statement No. 107</i>
127.	<i>Deferral of the Effective Date of Certain Provisions of FASB Statement No. 125—an amendment to FASB Statement No. 125</i>
128.	<i>Earnings per Share</i>
129.	<i>Disclosure of Information about Capital Structure</i>
130.	<i>Reporting Comprehensive Income</i>
131.	<i>Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information</i>
132.	<i>Employers' Disclosures about Pensions and Other Postretirement Benefits—an amendment of FASB Statements No. 87, 88, and 106</i>
133.	<i>Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities</i>
134.	<i>Accounting for Mortgage-Backed Securities Retained after the Securitization of Mortgage Loans Held for Sale by a Mortgage Banking Enterprise—an amendment of FASB Statement No. 65</i>
135.	<i>Rescission of FASB Statement No. 75 and Technical Corrections</i>
136.	<i>Transfers of Assets to a Not-for-Profit Organization or Charitable Trust That Raises or Holds Contributions for Others</i>
137.	<i>Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities—Deferral of the Effective Date of FASB Statement No. 133—an amendment of FASB Statement No. 133</i>
138.	<i>Accounting for Certain Derivative Instruments and Certain Hedging Activities-an amendment of FASB Statement No. 133</i>

139.	<i>Rescission of FASB Statement No. 53 and amendments to FASB Statements No. 63, 89, and 121</i>
140.	<i>Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities—a replacement of FASB Statement No. 125</i>
141.	<i>Business Combinations</i>
142.	<i>Goodwill and Other Intangible Assets</i>
143.	<i>Accounting for Asset Retirement Obligations</i>
144.	<i>Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets</i>
145.	<i>Rescission of FASB Statements No. 4, 44, and 64, Amendment of FASB Statement No. 13, and Technical Corrections</i>
146.	<i>Accounting for Costs Associated with Exit or Disposal Activities</i>
147.	<i>Acquisitions of Certain Financial Institutions—an amendment of FASB Statements No. 72 and 144 and FASB Interpretation No. 9</i>
148.	<i>Accounting for Stock-Based Compensation—Transition and Disclosure—an amendment of FASB Statement No. 123</i>
149.	<i>Amendment of Statement 133 on Derivative Instruments and Hedging Activities</i>
150.	<i>Accounting for Certain Financial Instruments with Characteristics of both Liabilities and Equity</i>
151.	<i>Inventory Costs—an amendment of ARB No. 43, Chapter 4</i>
152.	<i>Accounting for Real Estate Time-Sharing Transactions—an amendment of FASB Statements No. 66 and 67</i>
153.	<i>Exchanges of Nonmonetary Assets—an amendment of APB Opinion No. 29</i>
154.	<i>Accounting Changes and Error Corrections—a replacement of APB Opinion No. 20 and FASB Statement No. 3</i>
155.	<i>Accounting for Certain Hybrid Financial Instruments—an amendment of FASB Statements No. 133 and 140</i>
156.	<i>Accounting for Servicing of Financial Assets—an amendment of FASB Statement No. 140</i>
157.	<i>Fair Value Measurements</i>
158.	<i>Employers' Accounting for Defined Benefit Pension and Other Postretirement Plans—an amendment of FASB Statements No. 87, 88, 106, and 132(R)</i>
159.	<i>The Fair Value Option for Financial Assets and Financial Liabilities—Including an amendment of FASB Statement No. 115</i>
160.	<i>Noncontrolling Interests in Consolidated Financial Statements—an amendment of ARB No. 51</i>
161.	<i>Disclosures about Derivative Instruments and Hedging Activities—an amendment of FASB Statement No. 133</i>
162.	<i>The Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles</i>
163.	<i>Accounting for Financial Guarantee Insurance Contracts—an interpretation of FASB Statement No. 60</i>
164.	<i>Not-for-Profit Entities: Mergers and Acquisitions—Including an amendment of FASB Statement No. 142</i>
165.	<i>Subsequent Events</i>
166.	<i>Accounting for Transfers of Financial Assets—an amendment of FASB Statement No. 140</i>
167.	<i>Amendments to FASB Interpretation No. 46(R)</i>
168.	<i>The FASB Accounting Standards Codification™ and the Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles—a replacement of FASB Statement No. 162</i>

Sumber : www.fasb.org

Tabel 3. Standar Akuntansi Internasional IAS / IFRS

NO.	JUDUL STANDAR
1.	<i>Presentation of Financial Statements</i>
2.	<i>Inventories</i>
3.	<i>Consolidated Financial Statements – Originally issued 1976, effective 1 Jan 1977. Superseded in 1989 by IAS 27 and IAS 28</i>
4.	<i>Depreciation Accounting – Withdrawn in 1999, replaced by IAS 16, 22, and 38, all of which were issued or revised in 1998.</i>
5.	<i>Information to Be Disclosed in Financial Statements – Originally issued October 1976, effective 1 January 1997. Superseded by IAS 1 in 1997</i>
6.	<i>Accounting Responses to Changing Prices – Superseded by IAS 15, which was withdrawn December 2003</i>
7.	<i>Statement of Cash Flows</i>
8.	<i>Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors</i>
9.	<i>Accounting for Research and Development Activities – Superseded by IAS 38 effective 1.7.99</i>
10.	<i>Events After the Reporting Period</i>
11.	<i>Construction Contracts</i>
12.	<i>Income Taxes</i>
13.	<i>Presentation of Current Assets and Current Liabilities – Superseded by IAS 1</i>
14.	<i>Segment Reporting</i>
15.	<i>Information Reflecting the Effects of Changing Prices – Withdrawn December 2003</i>
16.	<i>Property, Plant and Equipment</i>
17.	<i>Leases</i>
18.	<i>Revenue</i>
19.	<i>Employee Benefits</i>
20.	<i>Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance</i>
21.	<i>The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates</i>
22.	<i>Business Combinations – Superseded by IFRS 3 effective 31 March 2004</i>
23.	<i>Borrowing Costs</i>
24.	<i>Related Party Disclosures</i>
25.	<i>Accounting for Investments – Superseded by IAS 39 and IAS 40 effective 2001</i>
26.	<i>Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans</i>
27.	<i>Consolidated and Separate Financial Statements</i>
28.	<i>Investments in Associates</i>
29.	<i>Financial Reporting in Hyperinflationary Economies</i>
30.	<i>Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions – Superseded by IFRS 7 effective 2007</i>
31.	<i>Interests In Joint Ventures</i>
32.	<i>Financial Instruments: Presentation – Disclosure provisions superseded by IFRS 7 effective 2007</i>
33.	<i>Earnings Per Share</i>
34.	<i>Interim Financial Reporting</i>
35.	<i>Discontinuing Operations – Superseded by IFRS 5 effective 2005</i>
36.	<i>Impairment of Assets</i>
37.	<i>Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets</i>
38.	<i>Intangible Assets</i>
39.	<i>Financial Instruments: Recognition and Measurement</i>
40.	<i>Investment Property</i>
41.	<i>Agriculture</i>

Sumber : www.iasplus.com